

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Program Studi : ILMU HUKUM
Mata Kuliah : QANUN
Kode Mata Kuliah :
Jumlah Kredit : 2 (Dua) SKS
Semester : SATU
Mata kuliah Prasyarat :
Dosen Pengampu : Zuriah, S.Sy., M.H
Capaian Pembelajaran (CP) : Mahasiswa dapat memahami persoalan terkait dengan; Konsep Desentralisasi dan Otonomi Khusus Daerah Aceh, asas-asas pembentukan Qanun, materi muatan Qanun, Penyiapan dan pembentukan Qanun, landasan Syariat Islam di Aceh serta kaitannya dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain di Indonesia.

Pertemuan ke	Kemampuan Akhir yang Direncanakan	Materi Pokok	Bentuk pembelajaran (Metode dan Pengalaman Belajar)	Penilaian			Referensi
				Indikator ¹⁾	Bentuk ²⁾	Bobot ³⁾	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Mahasiswa mengetahui Kontrak belajar dan pengenalan Qanun Aceh (perda)	kontrak Belajar dan Pengenalan Mata Kuliah Qanun (Perda)	<i>Explaining</i> (ceramah)	Mahasiswa dapat menjelaskan kontrak belajar, Ruang Lingkup Perkuliahan Pengantar Hukum Indonesia RPS dan Referensi Mata Kuliah	NON TES	-	RPS
2	Mahasiswa mampu	Defenisi Qanun	<i>Explaining</i>	Defenisi Qanun dan Sejarah	NON TES	-	RPS

	memahami dan menjelaskan Defenisi Qanun		(ceramah), <i>Question and Answer</i>	Penerapan Syariat Islam di Aceh			
3	Mahasiswa mampu memahami menjelaskan Asas-asas Pembentukan Qanun	Asas-asas Pembentukan Qanun	(ceramah), <i>Question and Answer</i>	Asas-asas Pembentukan Qanun meliputi: Kejelasan Tujuan, Kelembagaan, Kesesuaian, Keterlaksanaan, kedayagunaan, keterbukaan dan keterlibatan Publik.	NON TES		
4	Mahasiswa mampu memahami menjelaskan Tata cara Pembentukan Qanun (<i>Taqnin</i>)	Tata cara Pembentukan Qanun (<i>Taqnin</i>)	ceramah, <i>Question and Answer</i>	Tata cara Pembentukan Qanun (<i>Taqnin</i>)	NON TES		
5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Penyiapan pembentukan Qanun	Penyiapan pembentukan Qanun	ceramah, <i>Question and Answer</i>	Penyiapan pembentukan Qanun meliputi: kewenangan, penyiapan dari Gub/Bupati/walikota.	NON TES		
6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Partisipasi masyarakat	Partisipasi masyarakat	ceramah, <i>Question and Answer</i>	Partisipasi masyarakat; masukan lisan, tulisan, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat Umum (RDPU), Seminar lokakarya dan atau Dikusi.	NON TES		
7	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Tengah Semester (UTS)	UTS	TES	25	
8	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis Perda Syari'ah di Aceh	Perda Syari'ah di Aceh	ceramah, <i>Question and Answer</i>	Perda Syari'ah di Aceh meliputi; landasan Penerapan Syariat Islam di Aceh, Qanun Jinayah, Rancangan Qanun Hukum Keluarga	NON TES		
9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Wewenang Mahkamah	Wewenang Mahkamah Syar'iah di Aceh	ceramah, <i>Question and Answer</i>	Wewenang Mahkamah Syar'iah di Aceh meliputi: Kompetensi Absolute	NON TES		

	Syar'iah di Aceh			dan Relatif			
10	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Desentralisasi Asimetrik di Aceh	Desentralisasi Asimetrik di Aceh	ceramah, <i>Question and Answer</i>	1. Konsep tentang Desentralisasi asimetrik 2. Penerapan Desentralisasi Asimetrik di Aceh (Otonomi Khusus) 3. Problema Desentralisasi Asimetrik di Indonesia	NON TES		
11	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Masalah konseptual dalam penerapan Syariat Islam	Masalah konseptual dalam penerapan Syariat Islam	ceramah, <i>Question and Answer</i>	Masalah konseptual dalam penerapan Syariat Islam, Tumpang tindih kewenangan dalam penerapan syariat Islam di Aceh.	NON TES		
12	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Qanun Jinayah	Qanun Jinayah	ceramah, <i>Question and Answer</i>	Analisis Qanun №. 6 tahun 2014 tentang Tindak Pidana Jinayah.	NON TES		
13	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Problematika Penerapan syariat Islam di Aceh (studi Kasus)	Problematika Penerapan syariat Islam di Aceh	ceramah, <i>Question and Answer</i>	Perempuan dan Minoritas; kaitannya dalam penerapan syariat Islam	NON TES		
14	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Fungsionalisasi Nilai-Nilai Lokal dalam kebijakan Desentralisasi dan	Fungsionalisasi Nilai-Nilai Lokal dalam kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah pasca Penerapan Syariat Islam Aceh	ceramah, <i>Question and Answer</i>	1. Pemberdayaan nilai-nilai lokal 2. Potensi dan kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan nilai-nilai local. 3. Kontribusi nilai-nilai local terhadap <i>good local governance</i>	NON TES		

	Otonomi Daerah pasca Penerapan Syariat Islam Aceh						
15	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Sanksi Cambuk	Sanksi Cambuk	ceramah, <i>Question and Answer</i>	Sanksi Cambuk dalam Qanun Jinayah	NON TES		
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	<i>Question</i>	UAS	TES TERTULIS	35	RPS

- Catatan :
- 1) Indikasi-indikasi yang menyatakan pencapaian pembelajaran tiap tahapan belajar yang dapat diukur dan diamati
 - 2) Bentuk penilaian sesuai indikator capaian pembelajaran tiap tahapan belajar dalam bentuk tes/non tes
 - 3) Bobot (dalam %) tiap jenis penilaian sesuai dengan kedalaman dan keluasan capaian pembelajaran pada setiap tahapan pembelajaran

Referensi

- 1) Decentralization and Development : Cheema & Rondinelli
- 2) Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik. Jakarta: Kemitraan. Chalid, Pheni. (2005)
- 3) The Impact of Decentralization on Sosial Policy : Katalin Tausz :2002
- 4) Decentralized Unitary State; Agus Pramusinto, Ph.D; 2008
- 5) Konsep "Decentralized UNnitary State" di Indonesia, Tantangan & Relevansinya; Dr. Hasrat Arief Saleh; 2009
- 6) Government, Politic and The State : J. Piere & B. Guy Peters; 2000
- 7) Rethinking Democratic Accountability : R. D. Behn; 2001
- 8) Administrative Decentralization ; John M. Cohen & Stephen B. Peterson; 1999
- 9) Regionalism in Post Soeharto Indonesia : Maribeth Erb; 2005
- 10) Fiscal Decentralization in Developing Countries : Richard M Bird & Francois V; 2005
- 11) Local Government Borrowing: Pawel S. : 2003 Desentralisasi Fiskal; Islahuddin, Ph.D; 2009
- 12) Decentralization and Local Governance in Developing Countries : Pranab Bardan & D. Mookherjee : 2006
- 13) Comparing Local Government: Bas Denters & Lawrence E. Rose : 2005
- 14) Contemporary Southeast Asia : ISEAS: 2009
- 15) Karim, Abdul Gaffar (ed). (2003). Kompleksitas persoalan Otonomi Daerah di Indonesia
- 16) Ratnawati, Tri. (2006). Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia di Masa Perubahan, Otonomi Daerah tahun 2000-2005